

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkan paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, selambat-lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP 24 tahun 2005).

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Keuangan Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik, maka diperlukan pemahaman atas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun laporan keuangan, penatausahaan keuangan daerah (menyangkut pengendalian intern), sistem akuntansi, dan komponen laporan keuangan yang dihasilkan.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi(kegiatan untuk melakukan, pencatatan, dan pelaporan hasil keuangan), dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan penatausahaan pengeluaran kas adalah serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran kas.

Pengeluaran kas adalah suatu hal yang melibatkan catatan-catatan atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Menurut Kusmayasi bahwa penatausahaan pengeluaran kas itu adalah pencatatan atas segenap administarsi dan pengurusan kebendaharaan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris dalam rangka pelaksanaa APBD.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Penatausahaan pengeluaran kas ini sangat penting bagi Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, untuk menegetahui bagaimana prosedur pengeluaran kas yang terjadi, bagaimna suatu bendaharawan

bisa mengelola keuangan pada Badan Pusat Statistik, dan juga untuk memberikan informasi mengenai alur pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan keuangan pada Badan Pusat Statistik.

Penatausahaan pengeluaran kas sangatlah penting untuk diperhatikan, kelemahan dalam penatausahaan keuangan daerah ini mengakibatkan lemahnya dalam sistem pengendalian keuangan daerah, pada ujungnya akan sangat rendah kualitas bukti-bukti administrasi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

Penatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada Permedagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59/2007.

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas instansi atau lembaga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya mengatur tentang penatausahaan keuangan daerah agar bisa bekerja sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dengan maksud kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kemampuan akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang berkualitas pada setiap satuan kerja berbasis Standar Akuntansi Pemerintah yang secara progresif berkelanjutan merefleksikan suatu keinginan mencapai transparansi umum. Untuk dapat menyalankan tugas dan fungsi yang diembannya, bendahara perlu diarahkan oleh petunjuk teknis yang mengatur mengenai proses penatausahaan yang harus dilakukan mereka dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh bendahara atas pelaksanaan tugas mereka. Atas dasar

pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PARIAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis ingin merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman.
2. Bagian-bagian atau divisi-divisi apa saja yang terkait dengan prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman.
3. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam pencatatan prosedur penatausahaan pengeluaran kas.

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tentang prosedur penatausahaan pengeluaran kas pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman.

2. Untuk mengetahui bagaimna prosedur penatausahaan pengeluaran kas, juga mengetahui persamaan dan perbedaan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman
3. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
4. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang sesungguhnya berdasarkan kenyataan yang dilihat dilapangan.

1.4 Manfaat Penulisan

Selain tujuan yang ingin dicapai, sebuah kegiatan juga harus mempunyai kegunaan atau manfaat. Manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini merupakan sarana menambah wawasan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Universitas Andalas. .

2. Bagi Perusahaan,

Diharapkan hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan dan masukan apakah prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang sesuai dengan sistem akuntansi yang lazim, serta untuk menjalin kerja sama yang baik antara Universitas dengan perusahaan.

3. Bagi Universitas Andalas

Sebagai referensi dan bahan perbandingan sejauh mana kurikulum pendidikan diaplikasikan dalam sebuah perusahaan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman yang beralamat di Jl. Sentot Alibasa, Jati Kota Pariaman. Waktu pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 30 Mei 2016 sampai 29 Juli 2016.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan magang mengenai “Prosedur Pentausahaan Pengeluaran Kas pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman” dibagi dalam lima bab dan secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, maksud, dan tujuan serta manfaat magang, tempat, dan waktu magang beserta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian sistem dan prosedur akuntansi, pengertian kas, pengertian pengeluaran kas, pengertian penatausahaan pengeluaran kas dan prosedur pengeluaran kas sebagai dasar penilaian kinerja pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman .

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi, aktivitas perusahaan, struktural organisasi, dan ruang lingkup perencanaan kerja yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pariaman.

BAB IV : PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PARIAMAN

Merupakan bab pembahasan yang berisikan gambaran umum, dan prosedur penatausahaan pengeluaran kas pada Badan Pusat Statistik Kota Pariaman.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

